

“REPUBLIK” LANFANG KONGSI DI KALIMANTAN BARAT

“REPUBLIC” OF LANGFANG KONGSI IN WEST KALIMANTAN

Sugiri Kustedja

Centre for Chinese Diaspora Studies (CCDS), Universitas Maranatha

xietiangong2012@gmail.com

ABSTRAK

Dalam sejarah Kalimantan Barat tertulis pernah berdiri perkumpulan yang beranggotakan para penambang emas Tionghoa yang bernama Lanfang Kongsi (1777-1884). Kongsi memiliki cara pengelolaan yang oleh beberapa peneliti Barat disamakan dengan sistem pemerintahan demokrasi republik. Tulisan ini menguraikan latar belakang budaya anggota kongsi yang menjadi perekat untuk mempersatukan para anggotanya. Kongsi ini memiliki keunikan dalam bentuk organisasi dan mekanisme pengambilan putusan, pemilihan ketua, serta pemilihan para pengurus. Awal pendirian dan berakhirnya kongsi ini karena diduduki pemerintah kolonial Belanda. Tulisan ini memuat model acuan yang telah ditiru untuk menjalankan sistem pengelolaan kongsi, sebelum adanya contoh tata negara demokrasi barat terbentuk.

Kata kunci : lanfang kongsi, tionghoa, kolonial, kalimantan barat

ABSTRACT

In the history of West Kalimantan, there has been an establishment of an association comprising Chinese gold miners, named Lanfang Kongsi (1777-1884). Kongsi conducted a management which by some western researchers was considered as a governmental system of democratic republican. This paper outlines the cultural background of the syndicate members being the glue to unite its members. This partnership is unique in the form of organization, decision-making mechanisms, election of the chairman, as well as the election of the board members. The initial establishment and the end of this kongsi occurred during the Dutch colonial occupation. This article contains reference model that had been emulated to run the kongsi management system, before any instances of state administration of western democracy was established.

Keywords: Lanfang kongsi, chinese, colonial, West Kalimantan

PENDAHULUAN

Masyarakat Tionghoa Diaspora di Kalimantan Barat

Pada banyak tulisan mengenai kehidupan Tionghoa diaspora di Nusantara, selalu bila berbicara mengenai daerah Kalimantan Barat kerap disinggung mengenai suatu periode sejarah dengan perkumpulan yang disebut Lanfang Kongsi (1777-1884). Arti harfiah dari Lanfang Kongsi adalah perkumpulan/persekutuan usaha “bunga anggrek” yang berkedudukan di Mandor.

Ketika itu, terdapat beberapa kongsi setempat lain yang ada bersamaan; ada Kongsi besar dan kecil. Akan tetapi, yang paling populer dan sering disebut-sebut adalah Lanfang Kongsi. Hal ini

disebabkan keberadaan Lanfang Kongsi yang dapat bertahan paling lama; lebih dari satu abad atau sekitar 107 tahun. Dalam sejarah penjajahan Belanda di Nusantara, perlawanan setempat dari Kongsi di Kalimantan Barat ini terjadi antara 1822-1824, 1850-1854, 1884-1885). Perlawanan ini relatif lebih lama bila dibandingkan dengan perlawanan yang dilakukan kepada VOC-Belanda di daerah lain di tanah air sampai akhirnya semua kongsi dapat ditundukkan oleh Belanda. Lanfang Kongsi ini merupakan perkumpulan yang terakhir diduduki Belanda. Bentuk sistem operasional untuk menjalankan aktivitas kongsi dalam mengambil keputusan bersama berdasarkan suara terbanyak merupakan

prosedur yang tidak lazim pada masa itu. Pada masa itu sistem feodal kerajaan/kesultanan lebih familiar. Bentuk proses tersebut sekarang dikenal sebagai sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dilakukan oleh Lanfang Kongsi di Kalimantan Barat ini dimuat dan diperkenalkan dalam beberapa tulisan lama oleh para peneliti dan pejabat kolonial dan diterbitkan di negeri Belanda, dalam bentuk jurnal dan buku.

Penduduk asli yang menghuni daerah Kalimantan Barat ini adalah suku Dayak, kemudian pada abad ke-16 masuk pendatang dari Semenanjung Malaka Johor (berelasi dengan kesultanan Sambas); Jawa yaitu dari

Demak (kesultanan Landak), Surabaya (kesultanan Sukadana) mendirikan kesultanan di pesisir Kalimantan Barat; kemudian para imigran Tionghoa dari Tiongkok Selatan pun mencari lahan penghidupan baru di Kalimantan Barat. Terakhir penguasa Belanda yang awalnya berniat berdagang kemudian beralih menjajah Nusantara.

Diperkirakan para pendatang Tionghoa sudah berada di Kalimantan Barat sejak abad ke-17. Hal ini terbukti dengan ditemukannya nisan tua Tionghoa yang bertahun dari masa tersebut di kompleks pemakaman Tionghoa. Pada masa Dinasti Ming sekitar abad ke-14 telah ada pos perdagangan Tionghoa di



Gambar 1 Menunjukkan kongsi-kongsi lain di Kalimantan Barat yang keberadaannya berbarengan dengan Lan Fang Kongsi (Sumber : Heidhuis : 47)

Kalimantan Barat. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa diperkirakan para pendatang tersebut jauh lebih awal lagi yaitu sekitar abad ke-9. Mereka datang secara sporadis, lalu menetap sebagai pedagang dan petani. Kemudian pada abad ke-18 ketika penambangan emas mulai berkembang, para sultan mendatangkan kelompok warga Tionghoa sebagai pekerja untuk menambang emas yang terdapat di daerah masing-masing (kemudian berkembang juga dengan tambang berlian). Mereka dijanjikan diberi perlindungan keamanan dalam wilayah yang diklaim sebagai kekuasaan sultan, dan mereka dibayar dengan cara bagi hasil. Para penambang merambah hutan dan gunung yang diperkirakan mengandung deposit logam emas. Akan tetapi, pada kenyataannya, para penambang ini harus berjuang sendiri menghadapi warga setempat, suku Dayak, yang merasa sebagai pemilik tradisional daerah-daerah tersebut, tanpa ada kepastian perlindungan dari kesultanan. Para penambang emas Tionghoa ini diundang datang karena memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis yang lebih canggih dibandingkan dengan para penambang Dayak tradisional.

Berita keberadaan endapan logam emas di Kalimantan Barat lambat-laun mencapai kembali kampung halaman masyarakat Tionghoa di Tiongkok Selatan tempat asal para buruh penambang tersebut. Mereka menamakan daerah Mandor di Kalimantan Barat ini sebagai Jinshan (harfiah: bukit emas). Kabar ini menggerakkan datangnya rombongan penambang dari Tiongkok Selatan secara swakarsa, dalam jumlah yang jauh lebih besar. (mirip dengan suasana "the gold rush" ke Benua Amerika Utara-

California dan Benua Australia.).

Keadaan yang tidak teratur demikian dengan sendirinya menimbulkan banyak gesekan antara para pendatang dengan berbagai pihak, yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda-beda. Berhadapan dengan kesultanan yang mengklaim sebagai penguasa wilayah mengharapkan upeti dan bagi hasil dari hasil penambangan. Juga niat sultan untuk menyuplai kebutuhan para penambang secara monopoli menyebabkan ketidakpuasan pada mereka. Selain itu, berhubungan dengan penduduk Suku Dayak yang merasa daerah miliknya secara tradisional telah dimasuki pendatang tanpa izin juga menyebabkan perlawanan. Kemudian terjadi persaingan antara para pendatang baru dengan kelompok penambang Tionghoa yang sudah berada di tempat tersebut sebelumnya, sehingga terjadi perebutan lahan daerah tambang ketika membuka lahan tambang yang baru. Terakhir adalah pertentangan dengan pihak Belanda yang berniat menguasai seluruh wilayah Nusantara. Setelah Belanda menundukkan pihak kesultanan di pesisir Kalimantan Barat, mereka berniat juga untuk menguasai para penambang agar mereka dapat menarik pajak dari para penambang untuk mengisi kas pemerintah kolonial. Akan tetapi, pada akhirnya, Belanda ingin menguasai secara langsung tambang-tambang emas tersebut. Situasi sulit demikian memaksa para penambang pendatang untuk dapat bertahan hidup dengan harus menyusun masyarakatnya sendiri secara mandiri.

Para pendatang penambang ini mayoritas berasal dari subetnik (dialek), Hakka (kejia, dari daerah Chaozhou: Jiayingzhou and Dapuxian), Hoklo/Theo-qiu (fulao, dari daerah Chaozhou), sebegini kecil dari kelompok Punti

(bendi), dan Hokkien (Fujian).

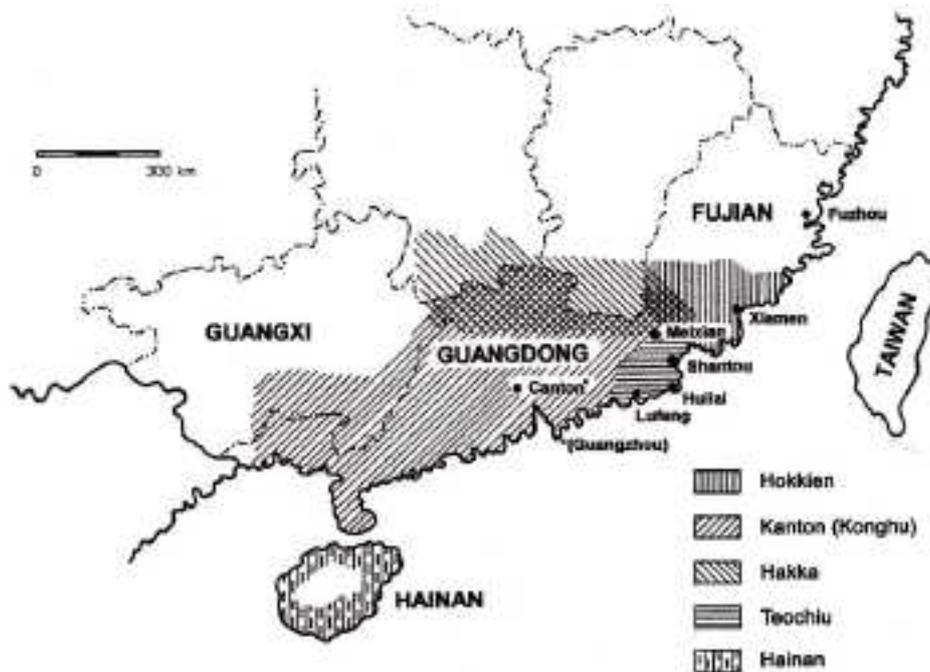
Para penambang pendatang biasanya berkelompok. Mereka berkelompok berdasarkan asal daerah, satu kampung, atau mungkin juga satu marga; pada beberapa kampung tradisional Tiongkok sering kali seluruh warganya memiliki nama marga yang sama. Selain itu, ikatan dialek dalam satu kelompok sangat kental, secara kohesif mereka akan sangat menyatu. Para pendatang itu berbicara dalam bahasa yang sama, berpikir dan bersikap dalam latar budaya yang sejalan. Hal ini mendukung kehidupan di tempat baru, saling membantu, bekerja sama, bersatu untuk melindungi kepentingan kelompok. Hal tersebut menyebabkan mereka sangat eksklusif ketika menghadapi dunia luar dengan kondisi alam dan masyarakat yang berbeda.

Kelompok komunitas ini juga akan menyatu dengan kepercayaan yang sama, dengan tokoh-tokoh pemujaan

yang sama (*deity*), kepercayaan yang diyakini dan dihayati sebagai budaya dalam sikap tindakan kehidupan keseharian. Orientasi kepercayaan ini pada setiap dusun tradisional terpusat pada klenteng lokal dengan tokoh yang beragam.

Sebagai masyarakat agraris, tokoh utama adalah Duti Gong (sering disebut juga sebagai Dabogong, penguasa lahan setempat), Fude Zhengshen. Kemudian untuk teladan budi pekerti mereka memuja tokoh Guandi, Guansheng Dijun. Untuk perlindungan dalam pelayaran dari Tiongkok Selatan ke Nusantara mereka berharap perlindungan dari tokoh Ma Zu, Tianshang Shengmu. Adapun tokoh yang dihormati untuk sikap kehidupan welas asih adalah Guanyin Pusa.

Tokoh-tokoh tersebut dapat dijumpai pada banyak klenteng Tionghoa diaspora di Nusantara. Para penambang di Kalimantan Barat, mayoritas memiliki dialek subetnik Hakka. Kelompok



Gambar 2 Daerah asal para migran Tiongkok Selatan (Sumber: Heidhues: 16)



Gambar 3 Fude Zhengshen, Guandi, Ma Zu.

ini juga membawa tokoh-tokoh yang dipercaya berkuasa, dan pelindung dalam penambangan logam, yaitu Sanshan Guowang.

Di dalam klenteng yang dibangun biasanya akan ditempatkan patung asli tokoh (jinshen) yang mereka bawa dari kampung halamannya ketika berangkat berlayar, sedangkan untuk pedupaan klenteng yang baru mereka akan mengawali dengan menempatkan abu dupa yang berasal dari klenteng asal mereka (fenxiang). Hal ini dilakukan karena berdasarkan keyakinan mereka yang mengaitkan bahwa kehidupan di tempat baru tidak terlepas dari akar keluarga di tempat asalnya.

Dialek dan kepercayaan merupakan dua unsur budaya yang dominan. Kedua unsur tersebut merekatkan persatuan di antara sesama anggota kelompok penambang. Mereka menyatukan diri dalam kelompok masyarakat kecil yang disebut hui. Hui akan mengatur segala segi kehidupan bersama, mulai dari segi logistik kelompok, menyusun program kegiatan ritual pada klenteng komunitas sepanjang tahun yang disesuaikan dengan kalender lunar, serta mengurus persiapan ritual dan pelaksanaannya.

Dalam aspek ekonomi, para penambang membentuk kelompok-kelompok kecil yang disebut sebagai *shansha* (harfiah: *pasir bukit*), *bali* (*parit, tambang*). Hasil tambang akan dibagi pada sesama anggota secara proporsional sesuai peraturan yang disetujui ketika kelompok dibentuk, mirip dengan pengaturan saham perusahaan pada masa kini. Beberapa kelompok kecil ini secara sukarela, atau pun dipaksa dengan dikalahkan, menyatu menjadi organisasi besar yang disebut sebagai Kongsji, atau *zongting*, contohnya Heshun *zongting* (1776). Perkumpulan ini memiliki sistem pengadilan berdasarkan peraturan kongsji, pasukan pertahanan, menjaga keamanan dan keselamatan bersama, menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak, memelihara prasarana, sistem irigasi, administrasi anggota, pembagian tugas para anggota, pembagian lahan pekerjaan, membuat uang logam sendiri, memungut pajak, cukai, mengupah para pengurus, dsb.

Pembentukan Lanfang Kongsji

Ada sedikit perbedaan pada pembentukan perkumpulan Lanfang Kongsji yang dibangun oleh Luo Fangbo (Lo

Fong-Pak; dialek Hakka). Luo Fangbo lahir di Shishanbao, daerah Jiayingzhou (1738-1795), Provinsi Guangdong, dan meninggal di Mandor; Kalimantan Barat. Pada tahun 1772 ia telah berlayar bersama rombongan ratusan warga migran ke Kalimantan Barat. Ia pertama menetap di Pontianak bekerja sebagai guru. Sebagai seorang cendekiawan, Luo Fangbo, menonjol di antara sesama warga Hakka pendatang. Pendapat dan pemikirannya mendapat perhatian dari rekan-rekannya. Pada masa itu, di Pontianak sering terjadi pergesekan di antara para pendatang, mereka berebut pengaruh antarkelompok, seperti dialek Hokkian, Hakka, atau Hoklo. Dari situasi ini, Luo Fangbo mengambil inisiatif untuk mengumpulkan 108 warga Hakka untuk bersama-sama membentuk pasukan (angka 108 diperkirakan meniru kisah rakyat 108 pendekar dari novel Tepi Air Shuihu Zhuan; hal lainnya adalah untuk setiap unit pasukan Lanfang Kongsu selalu beranggotakan 108 orang). Dengan kekuatan yang terkumpul ini, mereka mendatangi tambang Shanxin Jinhua dipimpin Zhang Acai di selatan daerah Mandor (utara Pontianak), dan memaksa Zhang mengakui kekuasaan kelompok Lanfang

Kongsu. Diawali dari lokasi inilah, Luo Fangbo mulai memperluas wilayah kekuasaan Lanfang Kongsu. Proses ini dijelaskan pula oleh peneliti de Groot.

Akan tetapi, ada peneliti lain, Schaank, mencatat versi yang berbeda. Ia menceritakan bahwa Luo Fangbo pada awal tahun 1774 memimpin perkumpulan dari daerah Montrado, Lan-fang hui, yang terdiri atas para petani. Mereka bersaing dengan perkumpulan serupa, yaitu Tian-di hui yang dipimpin oleh Liu Sanbo. Perkumpulan itu bersaing dan timbul pertempuran. Pada pertempuran tersebut, Luo Fangbo menemui kekalahan. Kemudian ia menyingkir dan mengumpulkan pasukan baru, lalu mendirikan Lanfang Kongsu di Mandor. Di kemudian hari, Tiandi hui dikalahkan oleh persekutuan para kongsu di Montrado. Persekutuan ini kemudian menjelma menjadi Heshun zongting.

Mengikuti ambisi Luo Fangbo, Lanfang Kongsu, bergerak memperluas kekuasaannya. Lanfang Kongsu memulai perluasan dengan menguasai daerah hunian Mao'en di utara Mandor, kemudian ia juga menduduki perusahaan tambang Minghuang (di daerah Mandor). Langkah Luo Fangbo selanjutnya adalah bekerja sama dengan Sultan Pontianak,



Gambar 4 Guanyin Pusa (kiri), Sanshan Guowang (tiga, kanan) .
(Sumber: Kwa Tong Hay.)



罗芳柏

LO FONG PAK

Gambar 5

Abdoel Rachman, untuk mengatasi gangguan dari penduduk suku Dayak. Lanfang Kongsi berhasil meluaskan wilayahnya dari daerah Sepata (antara Mandor dan Pontianak), lalu ke Landak hingga ke wilayah perbatasan daerah Sambas. Situasi ini membuat Luo Fangbo berkonsolidasi dan membangun pos-pos penjagaan di tempat-tempat simpul perhubungan melalui sungai sekitarnya (Sungai Sepata, Sungai Landak, dan Sungai Mempawa). Di sekitar kota Pontianak, Lanfang Kongsi, membangun beberapa kampung yang produktif, yaitu kampung yang menghasilkan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Luo menjabat pimpinan Lanfang kongsi dengan sebutan *zongting dage* (kakak tertua *zongting*).

Di kota Mandor ini Luo Fangbo mendirikan bangunan *zongting* bagi Lanfan Kongsi. Peneliti Veth menggambarkan bangunan *zongting* seperti suatu ruangan besar (aula), di sisi utara yang berhadapan dengan pintu masuk ditempatkan meja abu bagi tokoh Dabogong. Di kemudian hari, ditempatkan juga meja abu bagi papan nama (*ancestor tablet*) para mantan ketua dan pengurus kongsi. Pada ketiga sisi bangunan terdapat sketsel yang memisahkan enam ruangan. Keenam

ruangan tersebut diperuntukan bagi ruang pimpinan dan administrasi. Bangunan lain (di luar bangunan *zongting*) di sisi timur dan barat digunakan untuk ruangan rapat dan gudang. Di sisi depan bangunan ini terdapat lapangan luas yang dipergunakan untuk menampung para anggota ketika berkumpul. Seluruh lahan ini dilindungi oleh dinding pagar dengan tiang pancang. Di luar lahan *ting* tersebut dibangun barak-barak bagi para penambang untuk kapasitas 250 orang. Ketua kongsi bertempat tinggal di gedung *zongting*. Dari gedung inilah ketua kongsi mengendalikan seluruh kegiatan sehari-hari.

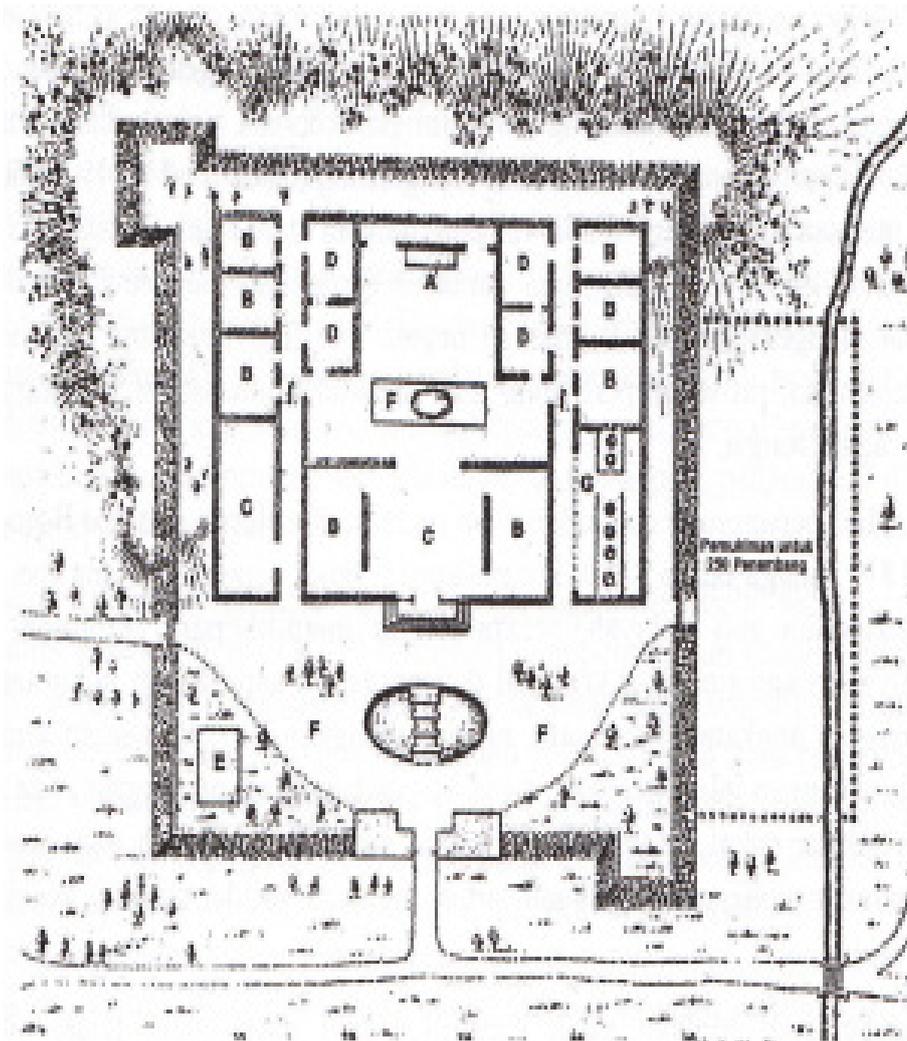
Tata Sebutan bagi Para Pengurus Lanfang Kongsi.

Dalam kongsi ini terdapat nama sebutan bagi para pengurusnya. Para pimpinan disebut *dage*, *taige* (kakak lelaki sulung). Akan tetapi, setelah Belanda masuk, sebutan ini diganti menjadi *Jiatai*. Tidak ada catatan mendetail yang menjelaskan mengapa ada perubahan sebutan dan cara pemilihan sebutan tersebut. Pada level terbawah, diadakan pemungutan suara untuk memilih kepala kampung yang disebut *laoda* (tetua). Untuk mewakili para anggota dipilahlah

futouren yang akan menjadi pembantu ketua. Dalam pengelolaan administrasi, di daerah Mandor dan kampung, seorang ketua dage dibantu oleh asisten, laoda, dan weige (kakak laki yang mengikuti/membuntuti), terkadang dibantu pula oleh seorang erge (kakak laki kedua). Pimpinan pasukan disebut junshi yang merangkap juga sebagai wakil ketua zongting. Pengurus klenteng disebut *fushou*, ia juga bertugas mengatur

acara ritual sesuai kalender lunar. Para pengurus tersebut secara berganti dipilih setiap empat bulan (kecuali ketua kongsi).

Untuk memilih para pengurus, Luo Fangbo, membuat kebijakan bahwa dage hanya boleh dijabat oleh mereka yang berasal dari daerah Jiayingzhou (daerah asal Luo Fangbo). Hal ini dilakukan karena Luo pernah tertipu oleh Huang Anba yang berasal dari daerah



Gambar 6 Denah bangunan zongting

Keterangan:

- A. Altar
 - B. Ruang pengurus dan Ketua (zongting dage)
 - C. Aula rapat
 - D. Ruang tamu
 - E. Gudang
 - F. Courtyard, sumur langit dianjing dengan kolam air (di dalam bangunan, di atasnya tanpa atap, terbuka)
- Halaman muka dengan kolam air (di muka bangunan) (sumber: Heidhues:49)

Zhenping. Adapun pembantu kepala yang bertugas di zongting harus berasal dari Dapuxian. Pemilihan ketua kampung dapat dilakukan oleh para warganya. Akan tetapi, para ketua kampung harus dijabat oleh seorang pendatang yang berasal dari Tiongkok. Setelah Belanda berkuasa dan Lanfang Kongsji mengakui kekuasaan Batavia, yaitu sejak masa dage kelima, Song Chabo, Belanda mulai turut campur dalam pemilihan ketua. Ketua yang terpilih harus disetujui dahulu oleh pemerintah kolonial.

Mengenai pribadi Luo Fangbo terdapat beberapa spekulasi kemungkinan ia adalah anggota perkumpulan rahasia Tiandhahui, De Groot beragumentasi, ia menolak kemungkinan ini, tetapi beberapa peneliti lain menyatakan ada kemungkinan benar. Beberapa peneliti juga berusaha menjelaskan bentuk perkumpulan Lanfang Kongsji yang sangat tertata berhierarki dan berdisiplin. Menurut Yuen Bing Ling tepatnya di Tiongkok Selatan Provinsi Fujian,

Meizhou, pada Sekolah Menengah Meibei, terdapat ruang peringatan untuk mengenang Luo Fangbo. Di sana diukirkan bahwa Luo adalah anggota perkumpulan Tiandihui.

Akhir Lanfang Kongsji

Berbarengan dengan desakan bertambahnya kekuasaan pemerintah Belanda, Lanfang Kongsji pun banyak mengalami perubahan. Ketua terakhir Lanfang Kongsji sebagai perkumpulan bebas adalah Liu Asheng (1848-1876, dan 1880-1884). Ia adalah seorang yang sangat berpengaruh pada masanya. Pada masa itu, Lanfang Kongsji mengalami perubahan dalam beberapa hal. Contohnya kebiasaan penggantian pimpinan, jabatan ketua yang biasa dipilih bebas oleh anggota, pada masa Liu ini ia dapat menunjuk putranya menjadi ketua menggantikan dirinya ketika ia berhenti sementara. Liu pun menempatkan istrinya menjadi staf penting dalam kongsji. Catatan



Gambar 7 tugu peringatan pada makam Luo Fang Bo

menyebutkan keadaan beberapa periode jabatan ketua, Lanfang Kongsu makin terpuruk akibat banyak terjadi pertempuran. Namun ketika di bawah kepemimpinan Liu, ia mampu membangkitkan kembali Lanfang Kongsu. Liu banyak membuat peraturan-peraturan baru, perbaikan bangunan zongting, perkuatan pos pertahanan perbatasan kongsu, perbaikan klinteng Xianfeng miao dan Fude ci. Kemudian, Liu Asheng memperoleh perkenan Sultan Landak untuk membuka baru tambang emas dan berlian di Bonan. Kelak terbukti tambang ini paling produktif di daerah Kalimantan Barat sehingga kota

Ngabang yang berdekatan dengan daerah tersebut berkembang dengan pesat.

Ketika pasukan Belanda terlibat dalam pertempuran dengan perkumpulan di Montrado, Liu Asheng secara resmi mengakui dan membantu Belanda. Secara taktis ia menyadari bahwa kekuatan pasukan Belanda yang datang dengan persenjataan jauh lebih canggih dan lengkap bukanlah tantangan bagi perkumpulannya. Kemudian, terhadap Belanda ia mengambil sikap politik dua muka. Pada suatu kesempatan ia bersahabat dan mengakui kekuasaan pemerintah kolonial Batavia tetapi secara terselubung masih membantu

TABEL I PARA KETUA LANFANG KONGSI (INFORMASI DARI HASAN KARMAN)

| No. | Nama | Periode | Peristiwa Penting dalam Masa Pimpinannya |
|-----|---------------|-----------|--|
| 1. | Luo Fangbo | 1777-1795 | Pendirian Lanfang Kongsu di Mandor pada tahun 1777 |
| 2. | Jiang Wubo | 1795-1799 | Perang dengan Panembahan Mempawah. |
| 3. | Jue Sibo | 1799-1803 | Konflik dengan orang Dayak dari Landak. |
| 4. | Jiang Wubo | 1803-1811 | |
| 5. | Song Chabo | 1811-1823 | Ekspansi tambang di Landak. |
| 6. | Liu Tai'er | 1823-1837 | Sudah di bawah pengaruh kolonial Belanda. |
| 7. | Gu Liubo | 1837-1842 | Konflik dengan Panembahan Landak dan kemerosotan kongsu. |
| 8. | Xie Guifang | 1842-1843 | |
| 9. | Ye Tenghui | 1843-1845 | |
| 10. | Liu Qianxing | 1845-1848 | Pertempuran dengan orang Dayak Landak. |
| 11. | Liu Asheng | 1848-1876 | Ekspansi tambang ke kawasan Landak. |
| 12. | Liu Liangguan | 1876-1880 | |
| 13. | Liu Asheng | 1880-1884 | Kejatuhan Lanfang Kongsu pada tahun 1884. |

sesama perkumpulan lain yang sedang melawan Belanda. Dalam keadaan sangat terpaksa, ia juga membantu pihak Belanda dalam pertempuran menghadapi perkumpulan lain. Dengan berpolitik secara zigzag, Liu berhasil memperpanjang keberadaan Lanfang Kongsii. Liu membantu penyerbuan pihak kolonial Belanda ketika menghancurkan sesama perkumpulan sejenisnya. Liu juga mempergunakan kekayaan pribadinya untuk mendukung Lanfang Kongsii, sampai saat terakhir, keuangan kongsii dan pribadinya tidak dapat menolong lagi.

Perkumpulan Lanfang Kongsii berakhir ketika Liu Asheng meninggal dunia. Pemerintah kolonial Belanda membubarkan perkumpulan ini, dan menempatkan seluruh anggotanya di bawah kendali administrasi pemerintahan kolonial Belanda.

SIMPULAN

Bentuk perkumpulan Lanfang Kongsii ini merupakan hal unik. Pada masa itu, hal semacam ini merupakan hal yang baru, seperti sistem cara memilih para pengurus dan pemimpinnya. Selain itu, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak para anggota. Perkumpulan Lanfang Kongsii beranggotakan para penambang yang harus merambah jauh ke pedalaman tanpa dukungan dari pihak lain sehingga harus secara mandiri bertahan mengurus kehidupan kelompoknya. Kongsii merupakan kelompok masyarakat bebas yang mengatur seluruh ketertiban ke dalam dan juga harus mampu bertahan terhadap pihak luar yang mengganggu. Kongsii membangun sistem peraturan, pengadilan, dan pengelolaan organisasi dengan aparat lengkap. Pemilihan ketua dilakukan bersama-sama berdasarkan

suara terbanyak dalam rapat lengkap (mirip cara memilih presiden sekarang). Berdasarkan situasi yang demikian, beberapa peneliti Barat menyamakan pengelolaan kongsii ini sebagai suatu sistem pemerintahan negara demokrasi “republik “ yang di dunia Barat juga baru muncul pada akhir abad ke-18. Mereka memunculkan istilah “Republik Lanfang Kongsii” (meskipun jumlah warganya sedikit). De Groot menggunakan istilah “republik desa”. Dari sinilah awal munculnya istilah “republik” bagi Kongsii di Kalimantan Barat.

Timbul pertanyaan dari beberapa peneliti, apa penyebab sistem ini dapat dijalankan oleh suatu komunitas kecil masyarakat tradisional yang terasing di pedalaman Kalimantan Barat. De Groot mengatakan sistem ini meniru pengorganisasian kehidupan di kampung tradisional di Tiongkok Selatan.

Yuen Bing Ling memperkirakan mereka mengacu dan menerapkan sistem yang diceritakan dalam novel populer klasik yang sangat dikenal oleh masyarakat umum di Tiongkok, cerita “Tepi Air Shuihu Zhuan”. Novel ini memiliki banyak kemiripan detail dengan sistem yang dijalankan oleh Lanfang Kongsii. Novel ini menceritakan 108 pendekar yang memisahkan diri. Mereka terlepas dari pemerintahan kekaisaran (unit pasukan Kongsii selalu berjumlah 108 orang). Para pendekar hidup terpencil di daerah yang sulit dicapai umum dan menjalankan kehidupan sebagai masyarakat bebas (*outlaw*). Dalam kenyataannya, Kongsii juga berada di tengah hutan rimba Kalimantan yang sangat sulit ditembus. Mereka mengurus secara mandiri seluruh kebutuhannya. Kongsii pun melakukan upacara ritual seperti yang diceritakan dalam novel. Kongsii mengadakan upacara ritual

sumpah kesetiaan dan persaudaraan bagi anggota baru dan para pengurus. Di dalam novel diceritakan pula keputusan penting dan pemilihan pimpinan ditentukan dan diambil berdasarkan rapat bersama juyihui di gedung khusus. Gedung itu bernama juyiting (Rapat anggota lengkap pada Kongsu diselenggarakan di gedung zongting).

DAFTAR PUSTAKA

- De Groot, J.J.M. (2014). *Sejarah Kongsu di Kalimantan Barat*. Alih bahasa :Ivan Taniputra. Bandung: Bina Manggala Widya.
- Heidhues, Mary Somers. (2008). *Penambang emas, petani, dan pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Nabil.
- Kwa Tong Hay. (2013). *Dewa-Dewi Klenteng*. Bandung: Bina Manggala Widya.
- Santosa, Iwan. (2014). *Tionghoa dalam sejarah kemiliteran*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Yuan Bing Ling. (2000). *Chinese Democracies : A study of Kongsu of West Borneo (1776–1884)*. Research School of Asian, African, and Amerindian Studies. Netherlands: Universiteit Leiden.